

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA TEGAL



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

NADYA FAZRIANA HANIZ

NIM. C2B008082

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nadya Fazriana Haniz

Nomor Induk Mahasiswa : C2B008087

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP

Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KOTA TEGAL**

Dosen Pembimbing : Dr. H. Hadi Sasana, SE., M.Si

Semarang, 17 September 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. H. Hadi Sasana, SE, M.Si)

NIP. 196901211997021001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Nadya Fazriana Haniz
Nomor Induk Mahasiswa : C2B008087
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ IESP
Judul Skripsi : **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK
DAERAH KOTA TEGAL**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 01 Oktober 2013

Tim Penguji

1. Dr. H. Hadi Sasana, SE., M.Si ()
2. Dr. Nugroho SBM., MSP ()
3. Nenek Woyanti, SE., MSP ()

Mengetahui Pembantu Dekan I
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Anis Chariri, SE., M.Com., PhD.Akt
NIP. 1967 0809 199 203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah saya, Nadya Fazriana Haniz menyatakan bahwa skripsi dengan judul : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkain kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 17 September 2013

Yang membuat pertanyaan

(Nadya Fazriana Haniz)

NIM : C2B009092

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Agama dan Ilmu Pengetahuan adalah bekal yang kita gunakan
dalam menjalani kehidupan ini

**APAPUN YANG TERJADI TETAP POSITIF, HADAPI, LAKUKAN APA
YANG BISA DILAKUKAN UNTUK MENCAPAI KEHENDAK KITA**

*Ketika kehidupan memberikan seribu tekanan yang membuat kita menangis
Tunjukkan kita punya sejuta senyuman untuk menghadapinya*

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk
Bapak, Ibu, kakak, dan sahabat-sahabat
tersayang**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal selama 20 tahun pengamatan, yaitu dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2010.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Kota Tegal. Data yang diperoleh adalah data penerimaan pajak daerah, wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa wajib pajak, pendapatan perkapita, dan pertumbuhan ekonomi Kota Tegal dari tahun 1991 sampai 2010 mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal, sedangkan pengaruh inflasi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

This research aims to analyze the factors that affect tax revenues the city of Tegal for 20 years of observation, that is, since 1991th until 2010th. Types of data used in this research is the secondary data were obtained from the Bureau of Statistics Central (BPS), the Department of Revenue and Asset Management Areas (DPPAD) of Tegal. The Data retrieved is the data of receipt tax area, per-capita income, taxpayer, inflation, and economic growth.

Results of analysis showed that the per-capita income, taxpayers, and economic growth in the city of Tegal since 1991th until 2010th had a significant influence on the tax revenue in city of Tegal, while inflation did not influence significantly to tax revenues in the city of Tegal.

Keywords: Local Tax, Per-Capita Income, Taxpayer, Inflation, Economic Growth

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah atas segala rahmat, nikmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kota Tegal”**.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Selama proses penulisan skripsi ini penulis mendapatkan begitu banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga dapat segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Ak., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. H. Hadi Sasana, M.Si selaku dosen pembimbing, dan ketua jurusan IESP yang telah meluangkan waktu dan perhatian di tengah kesibukkan untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta kesabaran hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dra. Tri Wahyu Rejekiningsih M.Si selaku dosen wali yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama duduk di perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah memberikan pengetahuan selama penulis duduk di bangku perkuliahan.

6. Kedua orangtuaku, bapak dan ibu, terimakasih untuk kasih sayang yang tak pernah habis, semangat dan doa untuk penulis.
7. Kakakku tercinta, Yania Hariza yang telah memberikan semangat, doa, kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Nitto Agustino yang tak pernah lelah mendengar keluh kesahku dan memberikan motivasi sehingga menjadikan penulis menjadi lebih tangguh.
9. Terima kasih kepada pegawai Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan pegawai Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Kota Tegal atas ketersediaa waktu dan tempatnya, dan memberikan data demi kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat atas dukungannya dan motivasinya, Opi, Gabby, Awalia, Angita, Melly, Icha, Ella, Goju, Ida, Nanik, Nia, dan Ika Puspita teman seperjuangan.
11. Teman-teman IESP reguler II 2008 yang saya kasihi, terima kasih perjuangan 4 tahun ini yang selalu menemaniku, mengisi hari-hariku. Andyka, Adelino, Berlian, Firza, Gerhard, Iqbal, Isty, Ketut, Leo, Andi, Hera, Muji, Philip, Tito, Rekha, Ocy, Ryan, Wanty, dan Yanuar. Terima kasih kebersamaannya, dukungan moral, perhatian, canda tawa, semoga persahabatan kita kekal abadi.
12. Terima kasih teman-teman tim KKN I Desa Kuanyar Kecamatan Mayong Jepara, Mbak Nanda, Sinta, Deka, Giolding, Galih, Yoga, dan Sinan yang telah memberikan semangat dan canda tawa.

13. Pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan, bantuan dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi segala pihak yang berkepentingan. Terimakasih

Semarang, 17 September 2013

Penulis

(Nadya Fazriana Haniz)

NIM. C2B008087

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAKSI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Manfaat Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
2.1 Landasan Teori.....	15
2.1.1 Pajak.....	15
2.1.1.1 Pengertian Pajak.....	15
2.1.1.2 Prinsip-prinsip Perpajakan	17
2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak	19
2.1.2 Wajib Pajak	21
2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak.....	21
2.1.2.2 Subjek Pajak.....	23
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah	25
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	25
2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.....	28
2.1.3.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Potensi PAD.....	28
2.1.4 Pajak Daerah	31
2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah	31
2.1.4.2 Objek Pajak Daerah.	32
2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah	32
2.1.5 Pendapatan Perkapita	33
2.1.6 Inflasi	36
2.1.6.1 Faktor Penyebab Inflasi.....	36
2.1.6.2 Akibat Buruk Inflasi.....	37
2.1.6.3 Macam-macam Inflasi.....	38
2.1.6.4 Menghitung Laju Inflasi.....	39

2.1.7	Pertumbuhan Ekonomi.....	40
2.1.7.1	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	44
2.1.7.2	Tahap-tahap Pertumbuhan Ekonomi.....	45
2.1.8	Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen.....	47
2.1.8.1	Pengaruh Wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	47
2.1.8.2	Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	48
2.1.8.3	Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	48
2.1.8.4	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	49
2.2	Penelitian Terdahulu	49
2.3	Kerangka Pemikiran.....	56
2.4	Hipotesis	57
BAB III	METODE PENELITIAN	58
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	58
3.1.1	Variabel Penelitian	58
3.1.2	Definisi Operasional.....	58
3.2	Jenis dan Sumber Data	59
3.2.1	Jenis Data	59
3.2.2	Sumber Data.....	60
3.3	Metode Pengumpulan Data	60
3.4	Metode Analisis Data	61
3.4.1	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	61
3.4.1.1	Deteksi Normalitas	61
3.4.1.2	Deteksi Multikolinieritas	62
3.4.1.3	Deteksi Heteroskedastisitas	62
3.4.1.4	Deteksi Autokorelasi	63
3.4.2	Pengujian Hipotesis	63
3.4.2.1	Analisis Regresi Linier Berganda	63
3.4.2.2	Deteksi Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	63
3.4.2.3	Deteksi Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	64
3.4.2.4	Koefisien Determinasi (R^2)	64
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
4.1	Gambaran Umum Kota Tegal	65
4.1.1	Keadaan Geografis	65
4.1.2	Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama	67
4.1.3	Keadaan Ekonomi	68
4.2	Hasil Penelitian	69
4.2.1	Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	69
4.2.1.1	Deteksi Normalitas	70
4.2.1.2	Deteksi Multikolinieritas	72
4.2.1.3	Deteksi Heteroskedastisitas	74

4.2.1.4 Deteksi Autokorelasi	76
4.2.2 Pengujian Hipotesis	77
4.2.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda	77
4.2.2.2 Deteksi Hipotesis Secara Parsial (Uji t)	80
4.2.2.3 Deteksi Hipotesis Secara Simultan (Uji F)	82
4.2.3 Koefisien Determinasi (R^2)	83
4.3 Pembahasan	84
BAB V Penutup	89
5.1 Simpulan	89
5.2 Keterbatasan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Tegal Tahun 1991-2010	7
Tabel 1.2	Realisasi Penerimaan Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 1991-2010	10
Tabel 2.1	Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu.....	53
Tabel 4.1	Data Penelitian	69
Tabel 4.2	Hasil Deteksi Normalitas	71
Tabel 4.3	Hasil Deteksi Multikolinearitas.....	73
Tabel 4.4	Hasil Deteksi Heteroskedastisitas	74
Tabel 4.5	Hasil Deteksi Autokorelasi	77
Tabel 4.6	Analisis Regresi Pengaruh Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pajak Daerah	79
Tabel 4.7	Hasil Deteksi Parsial (Uji t)	80
Tabel 4.8	Hasil Deteksi Simultan (Uji F).....	83
Tabel 4.9	Hasil Deteksi R^2	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2	Kerangka Pemikiran	57
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kota Tegal	66
Gambar 4.2	Hasil Deteksi Normalitas Residual P Plot	72
Gambar 4.3	Hasil Deteksi Heteroskedastisitas dengan Scatterplot.....	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD	94
Lampiran Realisasi Penerimaan Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi	95
Lampiran Hasil Regresi.	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan upaya pemanfaatan segala potensi yang ada di masing-masing daerah, oleh karena itu pembangunan lebih diarahkan ke daerah-daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan tersebut diserahkan langsung pada tiap-tiap daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah).

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan berbagai kewenangan dalam rangka desentralisasi ini tentunya harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Kabupaten atau Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah sebagai daerah-daerah otonom, dituntut mampu membiayai pengeluarannya dari sumber-sumber penerimaan yang ada di daerah tanpa

tergantung pemerintah pusat atau pemerintah provinsi dan diberikan sumber-sumber keuangan untuk membiayai pengeluarannya. Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah PAD (Pendapatan Asli Daerah) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah, retribusi daerah bagian laba dari perusahaan daerah, penerimaan dinas-dinas dan pendapatan lain-lain yang merupakan sumber pendapatan murni daerah.

Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah meskipun jumlahnya relatif memadai namun daerah harus lebih kreatif dalam peningkatan PAD-nya. Oleh karena itu, daerah harus dapat menggali sumber-sumber PAD yang potensial secara maksimal namun tentu saja harus dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang sah yang dikelola daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan usaha-usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Suhendi, 2007). Penerimaan PAD digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang berasal

dari beberapa sumber, salah satu sumber penerimaan tersebut adalah pajak. Untuk itu setiap daerah memiliki kebijakan-kebijakan tersendiri dalam mengoptimalkan penerimaan pajak. Sebab setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. Untuk mengoptimalkan PAD ada beberapa pos pendapatan asli daerah yang harus ditingkatkan diantaranya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat membuat kebijakan dimana pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola keuangan daerahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan sebutan desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonom yang nyata.

Menurut Koswara (2000), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara. Konsekuensi dari penerapan daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah (Undang-Undang No. 28 Tahun 2009). Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Salah satu pendapatan asli daerah yaitu pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, ditetapkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II. Adapun jenis-jenis pajak Daerah Tingkat I, antara lain : pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan jenis-jenis pajak Daerah Tingkat II, terdiri dari : pajak hotel dan restoran, pajak hiburan,

pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C, dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

Ada perubahan Undang–Undang No. 18 Tahun 1997 menjadi Undang–Undang No. 34 Tahun 2000 yang meliputi tujuh pajak Kabupaten/Kota, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, dan pajak pengambilan bahan galian Golongan C. Pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan yang utama dan juga alat pengatur keuangan daerah. Pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah, seperti membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai pengeluaran–pengeluaran pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan–kebutuhan yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang–barang publik.

Kota Tegal terkenal dengan kota Bahari karena dekat dengan pantai termasuk dalam Provinsi Jawa Tengah. Kota Tegal merupakan daerah yang cukup strategis untuk pusat perekonomian. Salah satu penerimaan daerah di Kota Tegal adalah dari sektor pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan daerah tersebut. Di Kota Tegal pajak daerah diklasifikasikan menjadi beberapa jenis pajak, antara lain: pajak penghasilan, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Dengan

banyaknya sumber pajak daerah yang dimiliki pemerintah daerah, maka Kota Tegal memiliki peluang untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah.

Berdasarkan data BPS Kota Tegal, diperoleh data bahwa pajak daerah merupakan penyumbang utama PAD Kota Tegal. Berikut data kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tegal dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2010.

Tabel 1.1
Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD di Kota Tegal
Tahun 1991 – 2010 (Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	PAD	Pajak Daerah	Besarnya Kontribusi (%)
1991	3.257.342	620.782	19,06
1992	3.340.452	618.017	18,50
1993	3.959.430	1.076.157	27,18
1994	4.660.156	1.126.102	24,16
1995	5.110.656	1.236.667	24,20
1996	5.741.001	1.287.776	22,43
1997	5.470.797	1.433.392	26,20
1998	7.789.055	1.746.003	22,42
1999	8.042.959	2.003.497	24,91
2000	6.765.212	1.653.996	24,45
2001	17.492.294	2.778.700	15,89
2002	30.410.520	4.120.425	13,55
2003	35.147.566	5.168.265	14,70
2004	42.359.747	6.656.722	15,71
2005	58.725.985	7.557.370	12,87
2006	63.725.637	8.134.226	12,76
2007	58.869.585	7.801.608	13,25
2008	69.567.244	10.694.367	15,37
2009	90.480.877	11.910.295	13,16
2010	101.321.867	13.100.646	12,93

Sumber : Data BPS Kota Tegal (2010)

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Tegal dari tahun 1991 sampai dengan 2010 mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Sebab salah satu komponen terbesar

dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah sangat berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada tahun 2006 tinggi yaitu sebesar Rp. 63.725.637 hal ini diikuti karena pajak daerah juga meningkat sebesar Rp. 8.134.226 Kontribusi yang paling banyak tercapai pada tahun 1993, yaitu 27,18 % kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan sampai dengan tiga tahun terakhir. Banyak sedikitnya kontribusi pajak pada penerimaan pajak daerah berkaitan dengan pendapatan masyarakat dan terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak. Hal ini diperkuat dengan pendapat Lains (1985) yang menyatakan bahwa rendahnya kontribusi pajak daerah dalam PAD disebabkan oleh terbatasnya wewenang daerah untuk memungut pajak daerah, hal ini sebagai akibat dijadikannya pajak-pajak yang hasilnya besar sebagai pajak sentral dan dipungut oleh pemerintah pusat. Karena bagaimanapun juga, tinggi rendahnya realisasi perolehan PAD sangat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya realisasi perolehan pajak daerah.

Berdasarkan teori perpajakan, Musgrave (1989) besar kecilnya penerimaan disektor pajak sangat ditentukan oleh jumlah penduduk, sehingga dikatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.

Wantara (1997) mengatakan bahwa besar kecilnya penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh laju inflasi. Pembangunan yang mengatasi pengangguran besar-besaran dan penggunaan modal yang sangat rendah tidaklah mampu menyediakan output yang dibutuhkan secara cepat, dalam keadaan demikian kenaikan tingkat pengeluaran cenderung tercermin pada kenaikan harga,

karena diperkirakan kebijakan fiskal yang cermat untuk menghindari inflasi. Oleh karena itu dengan adanya laju inflasi atau prosentase tingkat harga maka dapat dikatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Disini pemerintah cenderung memutuskan untuk menyerap kenaikan output tanpa menaikkan pajak, sehingga permintaan agregat meningkat (inflasi akibat permintan). Begitu pula dengan kenaikan biaya secara tiba-tiba jika didukung oleh perluasan pemerintah, maka akan mendorong kenaikan harga, selanjutnya mengakibatkan kenaikan upah yang diperlukan untuk mengimbangi biaya (inflasi akibat penawaran).

Pendapatan masyarakat menunjukkan kemampuan masyarakat untuk membayar pengeluarannya termasuk untuk membayar pajak. Semakin besar tingkat pendapatan perkapita, masyarakat mempunyai pengaruh positif dalam meningkatkan penerimaan pajak.

Pertumbuhan ekonomi sangat berpengaruh terhadap pajak, karena dengan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak, maka akan semakin baik pula pertumbuhan ekonomi, karena pembangunan yang terjadi bersumber dari rakyat.

Tabel 1.2
Realisasi Penerimaan Jumlah Wajib Pajak, Pendapatan Perkapita, Inflasi,
dan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tegal Tahun 1991 – 2010

Tahun	Wajib Pajak (Orang)	Pendapatan Perkapita (Rp)	Inflasi (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1991	295	447.584	9,35	3,88
1992	230	427.743	8,61	3,57
1993	340	533.828	7,70	3,78
1994	343	556.650	4,13	4,67
1995	693	651.571	4,73	4,04
1996	841	494.903	9,47	3,62
1997	654	532.913	11,29	4,58
1998	579	506.716	12,80	4,24
1999	530	868.484	8,93	4,79
2000	731	807.985	5,88	4,11
2001	1.205	1.444.138	7,45	4,81
2002	1.328	1.429.511	4,77	5,24
2003	2.286	1.502.980	7,44	4,77
2004	2.070	1.334.683	8,73	5,35
2005	2.622	1.389.217	8,11	5,39
2006	2.869	3.040.198	7,85	5,43
2007	2.615	3.194.698	7,26	5,36
2008	3.170	3.341.748	6,78	5,31
2009	3.568	3.488.546	7,60	5,99
2010	3.492	3.661.688	5,25	6,09

Sumber : Data BPS Kota Tegal (1991-2010)

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa wajib pajak cenderung mengalami peningkatan, walaupun terjadi penurunan pada tahun 1997 sampai 1999 yang dikarenakan banyak industri yang bangkrut pada saat itu, tetapi pada tahunnya berikutnya wajib pajak terus meningkat hingga mencapai 3.492 orang pada tahun 2010 hal ini berarti bahwa bidang industri di Kota Tegal sudah mulai membaik dan pembayaran pajak dilakukan dengan tertib oleh wajib pajak. Sedangkan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1998 hal ini disebabkan karena para pekerja menuntut untuk meningkatkan pendapatan mereka. Pendapatan perkapita di Kota

Tegal mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 1994 mengalami penurunan sebesar Rp. 494.903 hal ini diakibatkan karena tingkat pengangguran yang tinggi, sehingga mengganggu perkembangan ekonomi akibat jangka panjangnya ia mengganggu pendapatan perkapita. Kemudian persentase pertumbuhan ekonomi di Kota Tegal masih naik turun atau fluktuatif, dan pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,09%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah juga mengalami fluktuatif sejak tahun 1993 sampai dengan 2010 dan belum mencapai prosentase tertinggi seperti di tahun 1993, yaitu 27,18%. Oleh karena itu, dengan adanya permasalahan tersebut perlu dianalisis lebih lanjut guna menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah Kota Tegal yang potensial. Namun demikian, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Tegal mengalami penurunan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal, diantaranya jumlah wajib pajak, inflasi, pendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu sangat menarik untuk dianalisis sejauhmana faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Tegal, hal ini tertuang dalam rumusan masalah berikut.

1. Bagaimana pengaruh wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal?

2. Bagaimana pengaruh pendapatan perkapita daerah terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal?
4. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh wajib pajak terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Tegal.
2. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak di Kota Tegal.
3. Untuk menganalisis pengaruh inflasi terhadap penerimaan pajak di Kota Tegal
4. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak di Kota Tegal

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

1. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan tentang pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah
2. Bagi dunia ilmu pengetahuan, diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru yang berkaitan dengan ilmu ekonomi pada khususnya dan ilmu lain pada umumnya

3. Bagi pembuat kebijakan, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Kota Tegal sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan mengenai pajak daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Guna pengungkapan penelitian mudah dipahami dan lengkap, maka penelitian ini disusun dengan alur pembahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari landasan teori yang merupakan penjelasan mengenai dasar teoritis penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang menjelaskan keterkaitan antara variabel penelitian yang diamati dalam suatu gambar, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini terdiri dari definisi operasional variabel penelitian yang diamati, jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian, metode yang digunakan dalam pengumpulan data serta metode dan alat analisis yang digunakan beserta penjelasan pengukurannya.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab yang terdiri dari seputar deskripsi dari obyek yang diteliti serta pembahasan mengenai hasil perhitungan data alat analisis yang dipakai.

BAB V PENUTUP

Bab yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan dan saran berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (1992) pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, individu mempunyai hidup sendiri dalam kepentingan masyarakat. Namun, individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan seterusnya yang harus dibiayai dari penghasilannya negara.

Dalam perkembangannya untuk menyesuaikan pajak dengan iklim dan kondisi perekonomian negara, pemerintah melakukan reformasi terhadap perpajakan baik atas pajak pusat maupun pajak daerah. Reformasi pajak adalah proses perubahan atas sistem perpajakan yang ada yang tidak atau kurang sesuai dengan kondisi yang berkembang mengarah pada sistem yang lebih baik

(Sutrisno, 1998). Salah satu tujuan reformasi perpajakan di Indonesia adalah untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari sektor perpajakan untuk mengurangi defisit APBN, disamping untuk menciptakan suatu sistem pajak yang lebih sederhana, lebih meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat dan untuk meningkatkan penerimaan negara. Mengenai pajak yang baik, jika memenuhi prinsip-prinsip tertentu seperti yang dikemukakan oleh Adam Smith (Suandy, 2008).

Penghasilan negara berasal dari rakyatnya melalui pemungutan pajak, dan dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Dua sumber itu merupakan sumber yang terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Pungutan pajak mengurangi penghasilan masyarakat atau individu, tetapi sebaliknya merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran pembangunan, yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat. Definisi pajak dikemukakan oleh Judisseno (1997) sebagai berikut :

“Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara”.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2002) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari definisi pajak tersebut di atas, jelas bahwa pajak merupakan kewajiban kenegaraan dan pengabdian peran aktif warga negara dalam upaya pembiayaan pembangunan nasional dan kewajiban perpajakan setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan-peraturan pemerintah.

2.1.1.2 Prinsip – prinsip Perpajakan

Menurut Smith dalam Soemitro (1982) pengenaan wajib pajak memenuhi empat syarat yaitu :

1. Kesamaan dan keadilan (*equality and equity*)

Prinsip kesamaan mengandung arti, bahwa keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Prinsip kesamaan ini sering disebut juga tidak ada perbedaan, sehingga wajib pajak yang berada dalam keadaan yang sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar.

Prinsip keadilan yaitu beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Pengertian keadilan disini merupakan pengertian yang bersifat relatif dan bergantung pada tempat, waktu dan ideologi yang mendasari. Mengenai prinsip keadilan ini ada dua prinsip keadilan yang

digunakan yaitu prinsip manfaat (*benefit*) dan prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*). Dalam prinsip manfaat ini Suparmoko (1986) dan Mangkoesobroto (1988) mempunyai pendapat yang sama yaitu, manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pembayaran kepada pemerintah.

Prinsip kemampuan untuk membayar (*ability to pay*) mengandung arti wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan kemampuannya untuk membayar pajak. Misalnya, wajib pajak yang memiliki kemampuan bayar yang sama akan dikenai pajak yang sama bebannya, sedangkan wajib pajak yang kemampuan membayar pajaknya berbeda dikenai pajak yang berbeda pula bebannya.

2. Kepastian (*certainty*)

Prinsip kepastian dalam pengenaan pajak mengandung arti pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap wajib pajak dalam hal ini adalah kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan tidak mengundang arti ganda sehingga dapat membuka peluang untuk ditafsirkan lain.

3. Kenyamanan pembayaran (*convenience of payment*)

Prinsip kenyamanan pembayaran artinya pajak dipungut pada saat yang tepat misalnya pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan memberikan kenyamanan (*convenient*) dan tidak menyusahakan atau memberatkan.

4. Pemungutan ekonomi (*economics of collection*)

Dalam pemungutan pajak hendaknya mempertimbangkan bahwa biaya pemungutan harus relatif lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dengan kata lain efisien. Jika biaya pemungutan pajak justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaannya maka akan terjadi kerugian atau tidak efisien.

Jadi, dalam menggunakan prinsip-prinsip perpajakan untuk dikenai wajib pajak sebaiknya memperhatikan empat syarat diantaranya kesamaan dan keadilan, kepastian, kenyamanan pembayaran, dan pemungutan ekonomi. Hal ini dikarenakan agar wajib pajak merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap beban pajak yang akan dikenai.

2.1.1.3 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya (Riadi, 2012)

1. Menurut golongannya, terdiri dari :

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Contoh : pajak penghasilan yang dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

Contoh : pajak pertambahan nilai yang terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa.

2. Menurut sifatnya, terdiri dari :

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan pada subjeknya.

Contoh : pajak penghasilan

- b. Pajak objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan.

3. Menurut lembaga pemungutannya, terdiri dari :

- a. Pajak negara atau pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh : pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak bumi dan bangunan

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing.

Contoh : pajak daerah Tingkat I (provinsi) meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor.

Dari uraian di atas, bahwa ada tiga jenis-jenis pajak yaitu menurut golongannya, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutannya. Sedangkan jenis pajak yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak menurut lembaga pemungutannya.

2.1.2 Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Wajib Pajak

Menurut UU KUP No. 28 Tahun 2007 bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Ada beberapa macam Wajib Pajak menurut (Mansyur, 2006)

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan NPWP paling lambat satu bulan setelah usaha dimulai. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan telah memenuhi syarat objektif dan syarat subjektif, wajib mendaftarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

2. Wajib Pajak Badan

Wajib pajak badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, dan perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, bentuk usaha tetap dan lain-lain.

3. Wajib Pajak Badan Usaha Tetap

Wajib pajak badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh Subjek Pajak LN (Luar Negeri) untuk menjalankan usaha di Indonesia.

Dari uraian di atas, bahwa wajib pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang meliputi wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, dan wajib pajak badan usaha tetap. Untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat terlihat dari beberapa besar wajib pajak yang menyampaikan SPT nya. Sebagai alat untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka SPT sangat dominan sebagai bukti atau dokumen yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk menilai kinerja perpajakannya pada wajib pajak. SPT juga dapat berfungsi sebagai pengukur kinerja suatu KPP dalam menghimpun dana masyarakat.

2.1.2.2 Subjek Pajak

Subjek pajak terdiri terdiri dari tiga jenis yaitu orang pribadi dan warisan belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi

wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. (UU Pajak Penghasilan No. 28 Tahun 2007). Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia

bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa subjek pajak terdiri dari subjek pajak badan dalam negeri, subjek pajak orang pribadi dalam negeri (termasuk warisan belum terbagi), subjek pajak badan luar negeri non BUT, subjek pajak orang pribadi luar negeri non BUT, dan subjek Pajak BUT (baik yang dimiliki oleh badan atau orang pribadi luar negeri).

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pendapatan adalah hasil pencaharian perolehan atau sesuatu yang didapatkan yang sebelumnya belum ada. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berlaku, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Negara

Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Poerwodarminto, 1967).

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Kemampuan daerah dalam membiayai sendiri pembangunan daerahnya masih mengalami kendala berupa rendahnya kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Indikator rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dapat dilihat dari Indeks Kemampuan Rutin daerah (IKR) yang diperoleh dari besarnya perubahan pendapatan asli daerah terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama (Rudianto, 1997).

Rendahnya pendapatan asli daerah dapat menunjukkan masih tingginya tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat serta menunjukkan masih terbatasnya peran pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan (Sriyana, 1999). Walaupun seberapa besar peranan pendapatan asli daerah yang ideal juga masih sulit dijawab karena belum ada pedoman yang pasti untuk meningkatkan besarnya pendapatan asli daerah yang ideal bagi suatu daerah (Ismail, 2001). Hal tersebut dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kemandirian daerah terus berkembang. Berdasarkan Widayat (2000) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten atau Kota antara lain :

1. Banyak sumber pendapatan Kabupaten atau Kota yang besar tetapi digali oleh instansi yang lebih tinggi, misalnya Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. BUMD belum banyak bisa memberikan keuntungan kepada pemerintah daerah.
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, retribusi dan pungutan lain.
4. Adanya kebocoran-kebocoran.
5. Biaya pungut yang masih tinggi.
6. Banyak peraturan daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
7. Kemampuan masyarakat untuk membayar pajak yang masih rendah.

Menurut Ismail (2000) rendahnya pendapatan asli daerah dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah. Sumber potensial di daerah sudah diambil oleh pusat sebagai sumber penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial, sebab yang lain belum intensifnya pelaksanaan pajak dan retribusi daerah.

Dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD,

penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Rendahnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor banyak sumber pendapatan daerah yang digali oleh instansi yang lebih tinggi, BUMD belum banyak memberikan keuntungan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang membayar pajak maupun retribusi, adanya kebocoran-kebocoran, biaya pungut masih tinggi, banyak peraturan daerah yang belum disempurnakan, dan sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah.

2.1.3.2 Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Halim (2007) kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu :

1. Pajak Daerah, meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota
2. Retribusi Daerah, meliputi retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain – lain pendapatan asli daerah yang sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga tuntutan ganti rugi, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah.

2.1.3.3 Faktor-faktor Mempengaruhi Potensi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2002) potensi pendapatan asli daerah masing-masing daerah berbeda sehingga mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Beberapa variabel yang dapat mempengaruhi potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai tolak ukur kemandirian daerah sebagai berikut :

1. Kondisi awal suatu daerah (keadaan ekonomi dan sosial suatu daerah)

Struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat menentukan tinggi rendahnya tuntutan akan adanya pelayanan publik sehingga menentukan besar kecilnya keinginan pemerintah daerah untuk menetapkan pungutan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya. Tuntutan akan adanya pelayanan publik yang ada di masyarakat industri atau jasa adalah lebih besar daripada tuntutan pada masyarakat agraris (berbasis pertanian)

2. Perkembangan PDRB Per kapita Riil

Semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah, semakin besar pula kemampuan masyarakat daerah tersebut untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintahannya. Dengan kata lain, semakin tinggi PDRB per kapita riil suatu daerah semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Sehingga daerah dapat lebih mandiri.

3. Pertumbuhan Penduduk

Besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik akan meningkat dan kemandirian daerah juga dapat ditingkatkan.

4. Tingkat Inflasi

Inflasi akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah yang penetapannya didasarkan pada omset penjualan, misalnya pajak hotel dan restoran.

5. Perubahan Peraturan

Adanya peraturan-peraturan baru, khususnya yang berhubungan dengan pajak atau retribusi, dengan ditertibkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membuka peluang yang lebih luas untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

6. Peningkatan Cakupan atau Ekstensifikasi dan Intensifikasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam usaha peningkatan cakupan ini, yaitu menambah objek dan subjek pajak dan retribusi, meningkatkan besarnya penetapan, dan mengurangi tunggakan.

7. Penyesuaian Tarif

Peningkatan pendapatan sangat tergantung pada kebijakan penyesuaian tarif. Untuk pajak atau retribusi yang tarifnya ditentukan secara tetap (*flat*) maka dalam penyesuaian tarif perlu mempertimbangkan laju inflasi. Kegagalan menyesuaikan tarif dengan laju inflasi akan menghambat peningkatan PAD. Dalam rangka penyesuaian tarif retribusi daerah, selain harus memperhatikan laju inflasi perlu juga ditinjau hubungan antara biaya pelayanan jasa dengan penerimaan PAD.

8. Pembangunan Baru

Penambahan PAD juga dapat diperoleh bila ditopang oleh pembangunan sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan pasar, pembangunan sarana dan prasarana baru, seperti pembangunan pasar, pembangunan terminal, pembangunan jasa pengumpulan sampah, dan lain-lain.

9. Sumber Pendapatan Baru

Adanya kegiatan usaha baru dapat mengakibatkan bertambahnya sumber pendapatan pajak atau retribusi yang sudah ada. Misalnya usaha persewaan laser disc, usaha persewaan komputer/internet dan lain-lain.

2.1.4 Pajak Daerah

2.1.4.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2005) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah iuran yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.4.2 Objek Pajak Daerah

Pajak daerah menurut Prakosa (2005) dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Pajak Daerah Propinsi, meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Daerah Kab/Kota, meliputi :
 1. Pajak Hotel
 2. Pajak Restoran
 3. Pajak Hiburan
 4. Pajak Reklame
 5. Pajak Penerangan Jalan
 6. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 7. Pajak Parkir

2.1.4.3 Sistem Pemungutan Pajak Daerah

Sistem pemungutan pajak daerah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sistem *official assesment* dan sistem *self assesment*.

1. Sistem *Official Assesment*

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak daerah (STPD).

2. Sistem *Self Assesment*

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (*novum*) ternyata masih ada pajak daerah yang kurang dibayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

2.1.5 Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita (*per capita income*) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

Dengan demikian pendapatan perkapita dari suatu negara dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{PDB perkapita} = \frac{\text{PDB tahun } t}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } t}$$

$$\text{PNB perkapita} = \frac{\text{PNB tahun } t}{\text{Jumlah penduduk pada tahun } t}$$

Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita negara yang bersangkutan.

Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita suatu negara.

Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga berlaku untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun dengan satuan rupiah. Menghitung angka-angka PDRB dengan tingkat pendekatan (Dumairy, 1999) yaitu :

1. Menurut pendekatan produksi berarti PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi yang berada di suatu wilayah atau propinsi dalam suatu waktu tertentu.
2. Menurut pendekatan pendapatan berarti PDRB merupakan balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi

suatu wilayah dalam waktu tertentu. Dalam definisi ini PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung netto.

3. Menurut pendekatan pengeluaran berarti PDRB adalah semua komponen pengeluaran akhir seperti :
 - a. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba.
 - b. Konsumsi pemerintah
 - c. Pembentukan modal tetap bruto
 - d. Perubahan stok
 - e. Ekspor netto dalam jangka waktu tertentu

Ketiga konsep pendekatan tersebut memberikan jumlah yang sama antara jumlah pengeluaran dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan dan harus sama pula dengan jumlah pendapatan untuk faktor-faktor produksinya.

2.1.6 Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentasi pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun.

2.1.6.1 Faktor Penyebab Inflasi

Masalah kenaikan harga-harga yang berlaku di berbagai negara diakibatkan oleh banyak faktor. Di negara-negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu gabungan dari dua masalah berikut :

- i. Tingkat pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa.
- ii. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah.

Kedua masalah tersebut berlaku apabila perekonomian sudah mendekati tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Dengan kata lain dalam perekonomian yang sudah sangat maju, masalah inflasi sangat erat kaitannya dengan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Disamping itu inflasi dapat pula berlaku sebagai akibat kenaikan harga-harga barang yang diimpor, penambahan penawaran uang yang berlebihan tanpa diikuti oleh pertambahan produksi dan penawaran barang, dan kekacauan politik dan ekonomi sebagai akibat pemerintahan yang kurang bertanggung jawab.

2.1.6.2 Akibat Buruk Inflasi

Seperti pengangguran, inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Oleh sebab itu masalah tersebut perlu dihindari. Salah satu akibat penting dari inflasi ialah ia cenderung menurunkan taraf kemakmuran golongan besar masyarakat. sebagian besar pelaku-pelaku kegiatan ekonomi terdiri dari pekerja-pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berlaku lebih cepat dari kenaikan upah para pekerja. Oleh sebab itu upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi dan

keadaan ini berarti tingkat kemakmuran segolongan besar masyarakat mengalami kemerosotan.

Prospek pembangunan ekonomi jangka panjang akan menjadi semakin memburuk sekiranya inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi cenderung akan menjadi bertambah cepat apabila tidak diatasi. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif, mengurangi ekspor dan menaikkan impor. Kecenderungan ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 1994).

2.1.6.3 Macam-macam Inflasi

Macam-macam inflasi menurut Sukirno (2005) antara lain :

1. Inflasi Merayap (inflasi yang terjadi sekitar 2-3 persen per tahun).
2. Inflasi Sederhana (inflasi yang terjadi sekitar 5-8 persen per tahun).
3. Hiperinflasi (inflasi yang tingkatnya sangat tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi dua kali lipat atau lebih dalam tempo satu tahun).

Sedangkan menurut Nanga (2005) dilihat dari tingkat keparahannya, inflasi dapat digolongkan dalam tiga kategori :

1. Inflasi sedang (*moderate inflation*)

Yaitu inflasi yang ditandai dengan harga-harga yang meningkat secara lambat, dan tidak terlalu menimbulkan distorsi pada pendapatan dan harga relatif.

2. Inflasi ganas (*galloping inflation*)

Yaitu inflasi yang mencapai antara dua atau tiga digit seperti 20, 100 atau 200 persen per tahun dan dapat menimbulkan gangguan-gangguan serius dalam perekonomian.

3. Hyperinflasi (*hyperinflation*)

Yaitu tingkat inflasi yang sangat parah, bisa mencapai ribuan bahkan milyar persen per tahun, merupakan jenis yang mematikan.

Jenis inflasi dilihat dari faktor-faktor penyebab timbulnya (Nanga, 2005) sebagai berikut :

1. Inflasi tarikan permintaan

Inflasi yang terjadi sebagai akibat dari adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran atau produksi agregat.

2. Inflasi dorongan biaya

Inflasi yang terjadi sebagai akibat adanya kenaikan biaya produksi yang pesat dibandingkan dengan produktivitas dan efisiensi perusahaan.

3. Inflasi struktural

Inflasi yang terjadi akibat dari berbagai kendala atau kekakuan struktural yang menyebabkan penawaran menjadi tidak responsif terhadap permintaan yang meningkat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa macam-macam inflasi dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatan inflasi dan faktor penyebab timbulnya tergantung dari sebab akibat terjadinya inflasi.

2.1.6.4 Menghitung Laju Inflasi

1. GNP Deflator

GNP Deflator adalah rasio GNP (*Gross National Product*) nominal pada tahun tertentu terhadap GNP riil pada tahun tersebut. Hal ini

merupakan ukuran inflasi dari periode dimana harga dasar untuk perhitungan GNP riil digunakan sampai dengan GNP sekarang. Perhitungan cara ini melibatkan semua barang yang diproduksi.

$$\text{GNP Deflator} = (\text{GNP nominal} : \text{GNP riil}) \times 100\%$$

2. Indeks Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index* (CPI)

Indeks harga konsumen berfungsi mengukur biaya pembelian kelompok barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen. Biasanya kelompok barang yang digunakan masyarakat dapat berubah. Hal ini disesuaikan pola konsumsi yang ada.

3. Indeks Harga Produsen (IHP)

IHP ini mengukur harga barang yang dibeli oleh produsen, yang meliputi bahan mentah dan barang setengah jadi. IHP juga digunakan untuk mengukur indeks harga pada awal distribusi. Kenaikan IHP dapat dijadikan tanda kenaikan IHK.

4. Indeks Biaya Hidup atau *Cost-of-living index* (COLI)

5. Indeks Harga Komoditas adalah indeks yang mengukur harga dari komoditas tertentu.

6. Indeks Harga Barang-barang Modal.

2.1.7 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses bukan

suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 1992).

Beberapa teori yang menerangkan mengenai hubungan diantara berbagai faktor produksi dengan pertumbuhan ekonomi. Pandangan teori tersebut antara lain :

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi kalsik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi kalsik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh pertambahan penduduk pada pertumbuhan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi klasik melihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan perkapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan perkapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi yaitu produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan perkapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan perkapita. Pada keadaan ini pendapatan perkapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah Keynes yaitu Evsey Domar dan Sir Roy F. Harrod. Teori Harrod-Domar ini mempunyai asumsi yaitu :

- a. Perkenomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
- b. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
- c. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.

- d. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save = MPS*) besarnya tetap, demikian juga ratio antara modal-output (*Incremental Capital-Output Ratio* atau ICOR)

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh (Loncolyn, 2004).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu :

- a. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, misalnya P per tahun.
- b. Adanya fungsi produksi $Q=f(K,L)$ yang berlaku bagi setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S=sQ$, bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya.
- d. Semua tabungan masyarakat di investasikan $S=I=\Delta K$.

Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan meabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian di investasikann. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Boediono, 1992).

2.1.7.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Data produk nasional dapat pula digunakan untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi, dan menentukan tingkat kemakmuran masyarakat dan perkembangannya. Untuk menilai prestasi pertumbuhan ekonomi haruslah terlebih dahulu dihitung pendapatan nasional riil yaitu PNB atau PDB yang dihitung menurut harga-harga yang berlaku dalam tahun dasar. Nilai yang diperoleh dinamakan PNB atau PDB menurut harga tetap yaitu harga yang berlaku dalam tahun dasar. Tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan PNB atau PDB riil yang berlaku dari tahun ke tahun (Sukirno, 1994).

Pertumbuhan ekonomi belum tentu melahirkan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan (pendapatan) masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena bersamaan dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi akan berlaku pula pertambahan penduduk. Apabila tingkat pertumbuhan ekonomi selalu rendah dan tidak melebihi tingkat pertambahan penduduk, pendapatan rata-rata masyarakat (pendapatan perkapita) akan mengalami penurunan. Sedangkan apabila dalam jangka panjang pertumbuhan ekonomi sama dengan pertambahan penduduk, maka perekonomian negara tersebut tidak mengalami perkembangan (*stagnan*) dan tingkat kemakmuran masyarakat tidak mengalami kemajuan. Dengan

demikian salah satu syarat penting yang akan mewujudkan pembangunan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi harus melebihi tingkat pertambahan penduduk (Sukirno, 2007).

2.1.7.2 Tahap – Tahap Pertumbuhan Ekonomi

Menurut W.W Rostow (1960) tahap-tahap pertumbuhan ekonomi yang linear (*mono-economic approach*) inilah yang menjadi syarat pembangunan untuk mencapai 'status lebih maju'. Rostow membagi proses pembangunan ke dalam lima tahapan yaitu :

1. Tahap masyarakat tradisional (*the traditional society*), dengan karakteristiknya:
 - a. Pertanian padat tenaga kerja;
 - b. Belum mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi (era Newton);
 - c. Ekonomi mata pencaharian;
 - d. Hasil-hasil tidak disimpan atau diperdagangkan; dan
 - e. Adanya sistem barter.
2. Tahap pembentukan prasyarat tinggal landas (*the preconditions for takeoff*), yang ditandai dengan:
 - a. Pendirian industri-industri pertambangan;
 - b. Peningkatan penggunaan modal dalam pertanian;
 - c. Perlunya pendanaan asing;
 - d. Tabungan dan investasi meningkat;
 - e. Terdapat lembaga dan organisasi tingkat nasional;
 - f. Adanya elit-elit baru;
 - g. Perubahan seringkali dipicu oleh gangguan dari luar.

3. Tahap tinggal landas (*the take-off*), yaitu ditandai dengan:
 - a. Industrialisasi meningkat;
 - b. Tabungan dan investasi semakin meningkat;
 - c. Peningkatan pertumbuhan regional;
 - d. Tenaga kerja di sektor pertanian menurun;
 - e. Stimulus ekonomi berupa revolusi politik,
 - f. Inovasi teknologi,
 - g. Perubahan ekonomi internasional,
 - h. Laju investasi dan tabungan meningkat 5–10 persen dari,
 - i. Pendapatan nasional,
 - j. Sektor usaha pengolahan (manufaktur),
 - k. Pengaturan kelembagaan (misalnya sistem perbankan).
4. Tahap pergerakan menuju kematangan ekonomi (*the drive to maturity*), ciri-cirinya:
 - a. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan;
 - b. Diversifikasi industri;
 - c. Penggunaan teknologi secara meluas;
 - d. Pembangunan di sektor-sektor baru;
 - e. Investasi dan tabungan meningkat 10–20 persen dari pendapatan nasional.

Tahap era konsumsi-massal tingkat tinggi (*the age of high mass-consumption*)

dengan :

- a. Proporsi ketenagakerjaan yang tinggi di bidang jasa;
- b. Meluasnya konsumsi atas barang-barang yang tahan lama dan jasa;

- c. Peningkatan atas belanja jasa-jasa kemakmuran.

Dari paparan di atas, dapat diketahui ada lima tahapan pertumbuhan ekonomi mulai dari tahap masyarakat tradisional sampai dengan tahap era konsumsi-massal tingkat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan dialami dari tingkatan yang paling rendah sampai tingkatan tertinggi. Sehingga perekonomian masyarakat pun mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2.1.8 Hubungan Variabel Dependen dengan Variabel Independen

2.1.8.1 Pengaruh Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak daerah

Penghasilan negara berasal dari masyarakat melalui pemungutan pajak, atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara. Jadi penghasilan itu untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Jadi dimana ada kepentingan masyarakat, disitu timbul pemungutan pajak, sehingga pajak merupakan peranan penting dalam kepentingan umum.

Masalah kepatuhan pajak merupakan masalah klasik yang dihadapi di hampir semua negara yang menerapkan sistem perpajakan. Berbagai penelitian telah dilakukan dan kesimpulannya adalah masalah kepatuhan dapat dilihat dari segi keuangan publik, kalau pemerintah dapat menunjukkan kepada publik bahwa pengelolaan pajak dilakukan dengan benar dan sesuai dengan keinginan wajib pajak, maka wajib pajak cenderung untuk mematuhi aturan perpajakan. Dalam penelitian Hutagaol (2007) menyimpulkan bahwa kesinambungan penerimaan negara dari sektor pajak diperlukan karena penerimaan pajak merupakan sumber

utama penerimaan APBN. Untuk menjamin hal tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak, kepatuhan wajib pajak juga berpengaruh atas penerimaan negara dari sektor pajak.

2.1.8.2 Pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Salah satu ukuran dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita. Semakin besar pendapatan masyarakat maka diharapkan akan menyebabkan kemampuan membayar pajak masyarakat menjadi semakin besar. Pada penelitian Agustiningtyas (2003) dibuktikan bahwa pendapatan perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Hal ini sesuai dengan teori perpajakan bahwa penerimaan pajak akan sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk (Musgrave, 1989).

2.1.8.3 Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Dengan adanya inflasi tidak semata berpengaruh pada kenaikan harga tetapi akan berimbas pula pada kondisi ekonomi lainnya. Perkembangan inflasi mempengaruhi laju perekonomian suatu negara. Setiap negara akan berusaha agar keuangannya stabil sehingga kegiatan perekonomian masyarakat dapat berkembang. Dalam penelitian yang dilakukan Tamara (2009) menyimpulkan bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.

2.1.8.4 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Pertumbuhan ekonomi merupakan gambaran umum dari hasil kerja pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi selalu menjadi salah satu indikator peningkatan kesejahteraan penduduk suatu daerah atau negara. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sektor pajak memegang peranan dalam perekonomian nasional maupun daerah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam setiap pembahasan mengenai pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian yang akhirnya memperluas peningkatan potensi sumber-sumber penerimaan pajak daerah. Dalam penelitian Tamara (2009) menyimpulkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan pajak daerah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Nugradi (2011), dalam penelitiannya mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pajak daerah di Kota Medan, bahwa potensi pajak daerah di Kota Medan akan menjadi andalan di masa mendatang dalam penerimaan pendapatan asli daerah. Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil (*Ordinary Least Square*). Adapun hasil penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan pajak daerah Kota Medan (hotel, restoran, dan parkir) mengalami peningkatan.
 - b. Dilihat dari model pajak hotel yang mempengaruhi secara signifikan adalah jumlah wisatawan, pengaruhnya adalah positif.
 - c. Pajak daerah Kota Medan memiliki potensial sebagai penerimaan pemerintah Kota Medan
2. Tamara (2009), dalam penelitiannya mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah di Kota Bandung dari tahun 1999-2008. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda (*multiple regression*). Dengan model regresi berganda, maka hasil penelitian sebagai berikut:
- a. Jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri di Kota Bandung mempunyai pengaruh signifikan terhadap realisasi perolehan pajak daerah di Kota Bandung.
 - b. Tingkat inflasi di Kota Bandung tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah.
 - c. Jumlah penduduk, inflasi, serta jumlah industri secara signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak di Kota Bandung.
3. Suwarno (2008), penelitian ini mengkaji tentang efektifitas evaluasi daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah yang bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan efektifitas sistem pemungutan pajak di Kabupaten Sukoharjo. Alat analisis yang digunakan menggunakan metode kuantitatif, dengan menghitung potensi

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah, menghitung kontribusi, dan menghitung efektifitas. Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Pajak daerah Sukoharjo berpotensi terus digali dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.
 - b. Sumber pendapatan pajak lokal memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan daerah.
 - c. Semua daerah pemungutan pajak di Kabupaten Sukoharjo sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100%, namun ada beberapa daerah pemungutan pajak kurang efektif karena tingkat efektifitas kurang dari 100%.
4. Agustiningtyas (2003), penelitian yang mengkaji tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah (Tahun 1998 – 2001). Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Jawa Tengah tahun 1998–2001 yang signifikan adalah pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, anggaran pembangunan pemerintah daerah/ investasi pemerintah daerah, dan daya listrik. Sedangkan jumlah hotel tidak berpengaruh secara signifikan.
5. Sutrisno (2002), penelitian yang mengkaji tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan penerimaan pajak daerah (studi kasus di Kabupaten Semarang) dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan untuk menganalisis elastisitas

masing-masing faktor pembentuk yang diamati terhadap penerimaan pajak daerah. Model yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa (OLS). Adapun hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Jumlah pelanggan listrik, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak, dan jumlah wisatawan berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah.
- b. Peningkatan jumlah pelanggan listrik akan memberikan efek yang besar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.
- c. Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif baik terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran maupun penerimaan pajak parkir.
- d. Peningkatan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.

Tabel 2.1
Rangkuman Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul	Variabel	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Eko Wahyu Nugradi dan Aisma Syamsi (2011), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Daerah Kota Medan”	Variabel: Pajak Daerah, Wisatawan Mancanegara, Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Hotel, Jumlah Penduduk, dan Tingkat Hunian Hotel	Analisis regresi dengan metode kuadrat terkecil (OLS)	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah Kota Medan meningkat, dilihat dari model pajak hotel yang mempengaruhi secara signifikan jumlah wisatawan, pajak daerah Kota Medan memiliki potensi sebagai penerimaan pemerintah Kota Medan.
2	Arshad Darulmalshah Tamara (2009), “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Bandung (1999-2008)”	Variabel: Pajak Daerah, PDRB, Jumlah Penduduk, Laju Inflasi, dan Jumlah Industri	Model regresi berganda	Jumlah penduduk, PDRB, jumlah industri mempunyai pengaruh signifikan, tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi perolehan pajak daerah, dan jumlah penduduk, inflasi, serta jumlah industri secara signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak Kota Bandung.
3	Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih (2008) “Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah”	Variabel: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Pajak Daerah, dan Sistem Pemungutan	Analisis Kuantitatif: menghitung potensi pajak daerah terhadap pendapatan asli	Dari analisis data dapat dilihat bahwa pajak daerah meningkatkan pendapatan asli daerah, sumber pendapatan pajak memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan pajak daerah, dan

			daerah, menghitung kontribusi, dan menghitung efektifitas	semua daerah pemungutan pajak sudah efektif sudah efektif karena tingkat efektifitasnya lebih dari 100 persen, namun ada beberapa daerah pemungutan pajak kurang efektif karena tingkat efektifitas kurang dari 100 persen.
4	Veronika Winarti Agustiningtyas (2003). "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1998 - 2001"	Variabel: Penerimaan Pajak Daerah, Pendapatan Perkapita, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Investasi Pemerintah Daerah, Daya Listrik Terambung	Analisis regresi berganda	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan perkapita, jumlah wisatawan, investasi pemerintah dan daya listrik tersambung berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan pengaruh jumlah hotel tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.
5	Sutrisno (2002), "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah (Studi Kasus di Kabupaten Semarang)"	Variabel: Laju Inflasi, Pendapatan Perkapita, Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, Jumlah Petugas Pajak, Jumlah Penduduk, Jumlah Industri, Jumlah Pelanggan Listrik, Jumlah Kendaraan	Metode OLS (<i>Ordinary Least Squares</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan jumlah pelanggan listrik, jumlah penduduk, pendapatan perkapita, jumlah petugas pajak, dan jumlah wisatawan berpengaruh dominan terhadap penerimaan pajak daerah. Peningkatan jumlah pelanggan listrik akan memberikan efek yang besar terhadap peningkatan penerimaan pajak daerah.

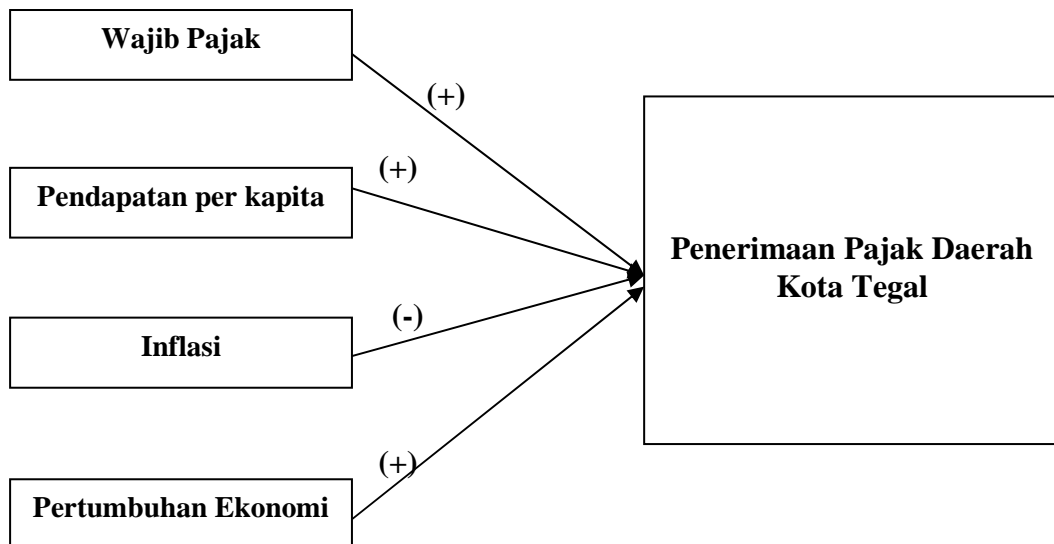
				Peningkatan pendapatan perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran maupun pajak parkir. Peningkatan jumlah wisatawan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran.
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Pendapatan asli daerah sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu ditegaskan sumber-sumber apa saja yang dapat dikategorikan menjadi keuangan pendapatan asli daerah, antara lain berupa pajak daerah, retribusi daerah, laba dari BUMD, serta sumber-sumber lainnya. Diantara berbagai sumber pendapatan asli daerah, pajak daerah merupakan sumber yang paling penting.

Pertumbuhan ekonomi sangat jelas kontribusinya terhadap penerimaan pajak, bahwa kondisi perekonomian yang kondusif akan memicu kinerja ekonomi pelaku usaha serta meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Pada sisi lain jumlah wajib pajak dalam pandangan ekonomi Keynes menganggap bahwa wajib pajak sebagai bentuk perluasan pasar (Budiono, 2003). Oleh sebab itu mereka memberikan sumbangan yang positif kepada perkembangan ekonomi. Dalam hubungannya dengan penerimaan pajak daerah, maka jumlah penduduk dianggap sebagai pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai barang dan jasa. Sehingga semakin banyak wajib pajak akan mempengaruhi pendapatan per kapita semakin meningkat. Dengan pendapatan perkapita yang tinggi tentunya menurunkan angka inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi stabil, hal ini mengakibatkan pendapatan asli daerah menjadi meningkat. Maka dalam penelitian ini akan menggunakan variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah di Kota Tegal sebagai berikut :

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang ditunjukkan pada diagram di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga wajib pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.
2. Diduga pendapatan perkapita mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.
3. Diduga inflasi mempunyai pengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.
4. Diduga pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah Kota Tegal.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah objek yang akan diteliti yang mempunyai variabel nilai (Efendi, 1989). Penelitian ini terdiri dari variabel dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan yaitu penerimaan pajak daerah, sedangkan yang menjadi variabel independen yaitu wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.

3.1.2 Definisi Operasional

Berikut adalah definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini :

1. Penerimaan pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan rupiah.
2. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Data pertumbuhan

ekonomi dihitung dari tingkat pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam satuan persen.

3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang berlokasi di Kota Tegal, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan di Kota Tegal. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan orang.
4. Pendapatan perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu daerah pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita diperoleh dari pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu daerah pada tahun tersebut. Data pendapatan perkapita dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan Rupiah.
5. Inflasi adalah kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dari satu periode ke periode lainnya di Kota Tegal. Data tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinyatakan dalam satuan persen.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (J. Supranto, 2000). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari instansi terkait. Data yang digunakan adalah data sekunder selama dua puluh tahun. Adapun data yang digunakan adalah :

1. Penerimaan pajak daerah Kota Tegal tahun 1991-2010.
2. Pendapatan perkapita Kota Tegal tahun 1991-2010.
3. Pertumbuhan ekonomi Kota Tegal tahun 1991-2010.
4. Wajib Pajak Kota Tegal tahun 1991-2010.
5. Inflasi Kota Tegal tahun 1991-2010.

3.2.2 Sumber Data

Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, yaitu dari publikasi instansi-instansi pemerintah seperti :

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah.
2. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tegal.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) Kota Tegal.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, yaitu mengumpulkan catatan-catatan atau data-data yang diperlukan sesuai penelitian yang akan dilakukan dari dinas atau kantor atau instansi atau lembaga terkait (Suharsimi Arikunto, 2002). Laporan-laporan yang terkait dengan penerimaan pajak daerah, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi, wajib pajak, dan inflasi. Data sekunder tersebut diperoleh dari dokumen resmi yang dikeluarkan instansi yang terkait. Pengumpulan dilakukan dengan studi pustaka dari buku-buku, laporan penelitian, buletin, jurnal ilmiah, dan penerbitan lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda yang diestimasi dengan metode kuadrat terkecil biasa (Regresi Linier). Penggunaan regresi linier bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, sekaligus untuk mengetahui besaran dan arah tanda variabel-variabel bebas (Ghozali, 2009). Berikut analisis regresi menggunakan SPSS diperoleh persamaan garis regresi:

$$Y_{Ln} = Ln\beta_0 + \beta_1 LnWP + \beta_2 LnPKAPITA + \beta_3 LnINF + \beta_4 LnPEK + e$$

Keterangan :

WP	= variabel wajib pajak
PKAPITA	= variabel pendapatan perkapita
INF	= variabel inflasi
PEK	= variabel pertumbuhan ekonomi
β_{1234}	= koefisien regresi
e	= faktor pengganggu

3.4.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

3.4.1.1 Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Alat analisis yang dapat digunakan adalah dengan melihat tampilan plot atau data dapat juga menggunakan *uji kolmogrov smirnov* (Ghozali, 2009).

Dengan kriteria pengujian, jika probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data dalam penelitian berdistribusi normal.

3.4.1.2 Deteksi Multikolinieritas

Deteksi multikolinieritas ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel bebas saling berhubungan secara linier. Jika ada kecenderungan adanya multikolinier maka salah satu variabel memiliki gejala multikolinier. Pengujian adanya multikolinier ini dapat dilakukan dengan melihat nilai *VIF* (*varians inflation factor*) pada masing-masing variabel bebasnya. Jika nilai *VIF*nya lebih kecil dari 10 tidak ada kecenderungan terjadi gejala multikolinier. Deteksi ini menggunakan SPSS dengan analisis *Collinearity Statistics*.

3.4.1.3 Deteksi Heteroskedastisitas

Deteksi heteroskedastisitas bertujuan untuk mendeteksi gangguan yang diakibatkan faktor- faktor dalam model tidak memiliki varians yang sama. Jika varians berbeda disebut homokedastisitas model regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *uji glejser*. *Uji glejser* menunjukkan bahwa model regresi tidak terkena heteroskedastisitas, dengan kriteria pengujian jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05.

3.4.1.4 Deteksi Autokorelasi

Deteksi autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Masalah ini timbul karena adanya

residual (kesalahan pengganggu) tak bebas dari suatu observasi ke observasi lainnya.

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi yaitu *Uji Durbin-Watson (DW test)*.

3.4.2 Pengujian Hipotesis

3.4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis data dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan model regresi linear berganda, dimana dalam analisis regresi tersebut akan menguji pengaruh wajib pajak, pendapatan perkapita, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Pengolahan data menggunakan SPSS dengan pengujian hipotesis dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara parsial maupun simultan.

3.4.2.2 Deteksi Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Deteksi statistik T ini bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual.

$H_0: \beta_i = 0$, artinya variabel independen secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

$H_0: \beta_i > 0$, artinya variabel independen secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

3.4.2.3 Deteksi Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Pendeteksi ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model dapat berpengaruh bersama-sama

terhadap variabel dependen. Dengan tingkat signifikansi α sebesar 5% atau 0,05 maka kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai signifikansi $f_{hitung} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak. Ini berarti bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.
2. Bila nilai signifikansi $f_{hitung} > 0,05$ maka H_0 diterima. Ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara semua variabel independen dengan variabel dependen.

3.4.2.4 Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2009). Analisis ini menggunakan Uji R^2 dengan *Model Summary*.